

PENGEMBANGAN STRATEGIS KETAHANAN DAN PERTAHANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Oleh:

Muchtar Ibrahim ¹⁾

Athor Subroto ²⁾

Donny Yoesgiantoro ³⁾

Universitas Indonesia, Jakarta ^{1,2,3)}

E-mail:

muchtar.ibrahim@ui.ac.id ¹⁾

athor.subroto@yahoo.com ²⁾

Energyprogram@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study examines how to develop resilience and defense strategies in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ). The research used by the researcher is research that has a descriptive nature based on several literature sources such as books, research results, journals, and research articles. This study explains that there is a potential conflict in the EEZ that may arise not only from China's assertive territorial claims over the sea but also from fellow ASEAN countries. With the waters being the Exclusive Economic Zone (EEZ) of Indonesia, the protection of Indonesia's national interests is a very important area. However, it is not uncommon for Indonesian patrol boats to face matches by ships from other countries because of national borders. Some strategies that can be done are to strengthen maritime security and maintain the Exclusive Economic Zone (EEZ) by advancing Indonesia's EEZ military base. Efforts to eliminate the practice of IUU fishing are carried out by implementing a policy of sinking ships, implementing strict laws to tackle illegal fishing, and expanding bilateral and regional diplomacy with neighboring countries that are members of the Association of Southeast Asian Nations and other neighboring countries.

Keywords: Resilience, Defense Strategy, Exclusive Economic Zone

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengembangan strategi ketahanan dan pertahanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif yang didasarkan pada beberapa sumber literatur seperti buku, hasil penelitian, jurnal serta artikel penelitian. Pada penelitian ini dijelaskan bahwasannya adanya potensi konflik di ZEE yang mungkin muncul tidak hanya dari klaim teritorial China yang tegas atas laut tetapi juga dari sesama negara ASEAN. Dengan perairan yang berbatasan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, maka perlindungan kepentingan nasional Indonesia di kawasan menjadi sangat penting. Namun, tidak jarang kapal patroli Indonesia menghadapi intimidasi oleh kapal negara lain karena melindungi perbatasan negara. Beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat keamanan maritim dan menjaga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan memajukan pangkalan militer ZEE Indonesia. Upaya menghilangkan praktik kecurangan yang dilakukan oleh pelaku IUU fishing dilakukan dengan mengadopsi kebijakan penenggelaman kapal, menegakkan hukum yang ketat untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, memperluas diplomasi bilateral dan regional dengan negara-negara tetangga yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan negara-negara tetangga lainnya.

Kata Kunci: Ketahanan, Pertahanan Strategi, Zona Ekonomi Eksklusif

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kondisi geografis yang didominasi oleh wilayah yang sangat luas perairan. Dengan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia berbatasan dengan banyak negara yang meningkatkan kemungkinan terjadinya gesekan antar negara (Putri, 2018). Letak Indonesia yang strategis dimana berada pada posisi bersilangan yang menjadikan wilayah laut sebagai kawasan perlintasan internasional dan memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah memungkinkan wilayah Indonesia dapat diklaim oleh negara lain jika tidak dijaga dan ditangani dengan baik dan tegas. Salah satu wilayah Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya kelautan adalah Laut Natuna dengan potensi berkelanjutan sebesar 767.126 ton di WPP 711 (Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Cina Selatan) (Vimy et al., 2022). Potensi ini berasal dari perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut, jika potensi ini dimanfaatkan secara optimal akan meningkatkan pendapatan negara dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar laut atau masyarakat pesisir.

Menegakkan kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), revitalisasi sektor ekonomi kelautan,

penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, serta peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia kelautan (HR), merupakan program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia . Untuk menjadi negara maritim, infrastruktur antar pulau dan pesisir di setiap pulau merupakan hal yang harus dibangun dan dikembangkan. Jalan antar pulau ini harus benar-benar diwujudkan dalam rangka memperlancar dan mempercepat transportasi antar pulau di Indonesia.

Sebagaimana negara lain di dunia, Indonesia menghadapi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan serta kebutuhan untuk memperkuat ketahanan nasional. Ancaman terutama sedang diubah, ditransformasikan atau diubah dari ancaman militer atau ancaman konvensional menjadi ancaman nonmiliter atau ancaman non-konvensional. Akibatnya, ancaman utama datang bisa datang dari berbagai sumber baik internal maupun ancaman eksternal. Salah satunya timbul dari partisipasi Indonesia dalam *Maritime Silk Road* (MSR) juga diatur dalam regulasi terkait illegal fishing dan masih kaburnya wilayah perairan Indonesia

dengan negara lain. Isu regulasi illegal fishing telah menyebabkan Indonesia merugi setidaknya US\$24 miliar, akibat illegal fishing oleh China, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Pada saat yang sama, blok perbatasan membuat serangan terhadap kapal komersial perbatasan masih sering terjadi terutama di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, dalam mengatasi masalah ini Indonesia dihadapkan pada klaim Cina di Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan Ekonomi Eksklusif Indonesia. Zona (ZEE). Tidak hanya itu, masalah hukum di sektor maritim dan maritim bersifat multikompleks, mengingat banyak sektor lain yang saling terkait. Akibatnya terjadi tumpang tindih peraturan, bahkan terkadang bertentangan satu peraturan dengan peraturan lainnya (Sugiharto & Shafwatullah, 2021). Masalah lain terkait dengan banyaknya kasus *illegal fishing*. Umumnya lokasi pencurian tersebut berada di perairan Indonesia bagian timur dan Pulau Natuna sebagai akibat dari ketimpangan infrastruktur khususnya armada patroli laut Indonesia. Penenggelaman kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di wilayah laut Indonesia harus dilakukan secara hati-hati, terutama tidak melanggar peraturan internasional dan perjanjian bilateral dengan negara tetangga khususnya di daerah ZEE.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan ini

Menyiasati hal tersebut peran strategis dan kesadaran Indonesia akan pentingnya laut untuk meningkatkan perekonomian merupakan kebutuhan yang mendesak bagi Indonesia sehingga diperlukan konsep keamanan maritim yang akan membawa perekonomian Indonesia kuat. Maritim sendiri merupakan sistem yang menghubungkan denyut nadi global negara-negara di dunia dan merupakan jalan terpenting dalam kelangsungan perekonomian global. Sehingga dibutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di perbatasan wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terhadap pengembangan strategis ketahan dan pertahanan di ZEE Indonesia.

2. METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini berupa jenis penelitian kualitatif. Sedangkan desain penelitian ini adalah deskriptif yang bersumber dari berbagai bahan literatur seperti artikel, buku, jurnal hingga penelitian yang telah dilakuan. Tidak hanya itu, penulis juga akan mengkaji dan mengkritisi gagasan, pengetahuan serta penemuan ilmiah yang memiliki kontribusi yang baik terhadap orientasi akademik. diharapkan bisa menyumbangkan kontribusi

baik secara teori maupun metodologi pada tema yang dipilih penulis dalam penelitian ini, Analisa yang sifatnya deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena, isu, data dan fakta yang berkembang di masyarakat. Data inilah yang akan dioleh dan dikembangkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitina yang dipilih oleh peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ancaman Ketahanan dan Pertahanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Ekonomi kelautan Indonesia telah meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam kurun waktu lima tahun, memberikan kontribusi sekitar USD 256 miliar dalam nilai tambah bruto (GVA) tahunan pada tahun 2013 naik dari USD 73 miliar pada tahun 2008. Kontribusinya terhadap PDB diperkirakan akan meningkat menjadi 28% Perkiraan asli OECD pada enam industri berbasis kelautan¹ menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ekonomi kelautan terbesar di seluruh negara ASEAN, menghasilkan 67% dari total nilai tambah dari industri ini di seluruh anggota ASEAN pada tahun 2015. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Timur Pasifik, Indonesia memiliki komposisi ekonomi kelautan yang berdampak signifikan terhadap

agak berbeda, lebih mengandalkan sektor perikanan (yaitu 83% dari nilai tambah ekonomi lautnya vs 31% di kawasan Asia Timur Pasifik); dan pada pembuatan kapal pada tingkat yang lebih kecil. Ekspansi ekonomi kelautan Indonesia telah berkontribusi pada dinamisme ekonomi negara yang kuat yang tercatat sejak setelah krisis keuangan Asia 1997, yang menjadikan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara berpenghasilan menengah sejak 2019.

Dengan banyaknya potensi yang dapat digali dari wilayah perairan Indonesia, tentunya hal ini akan memberikan dampak yang tidak dapat dielakkan, yaitu munculnya ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia khususnya di bidang maritim. Ancaman dapat datang dari berbagai sumber, baik dari negara tertentu maupun dari aktor non-negara, dengan intensitas ancaman yang berbeda-beda. Melindungi kedaulatan wilayah merupakan prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Untuk itu, pemerintahan Jokowi tampak bertekad untuk menegakkan kedaulatan teritorial terhadap gangguan dan diplomasi intensif untuk menyelesaikan perbatasan dengan negara tetangga. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir kondisi relatif stabil, laporan ini mengidentifikasi setidaknya tiga masalah keamanan dan ketertiban. stabilitas domain

maritim Indonesia.

Menghadapi tantangan ke depan, potensi ancaman militer dan non-militer masih mungkin terjadi bagi Indonesia. Secara geografis, Indonesia merupakan pintu gerbang kawasan Asia Pasifik. Tingkat kerawanan keamanan di kawasan Asia Pasifik akhir-akhir ini cenderung meningkat, saling klaim teritorial antar beberapa negara telah meningkatkan konsentrasi pengerahan kekuatan militer di kawasan ini. Sengketa wilayah yang melibatkan China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Brunei, bukan tidak mungkin berujung pada Kawasan Natuna yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Sengketa Laut China Selatan pada akhirnya juga berkembang menjadi arena persaingan kekuatan militer dunia ketika negara adidaya seperti Amerika Serikat ikut unjuk kekuatan dalam melindungi kepentingannya di kawasan.

Dalam sistem maritim internasional, kawasan Laut China Selatan (LCS) memiliki nilai ekonomi, politik, dan strategis. Namun, itu juga merupakan sumber perselisihan yang sudah berlangsung lama di antara negara-negara di kawasan ini. Bagi Indonesia, potensi konflik di LCS mungkin muncul tidak hanya dari klaim teritorial China yang tegas atas laut tetapi juga dari sesama negara ASEAN. Dengan perairan LCS yang

berbatasan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, maka perlindungan kepentingan nasional Indonesia di kawasan menjadi sangat penting. Namun, tidak jarang kapal patroli Indonesia menghadapi intimidasi oleh kapal negara lain karena melindungi perbatasan Negara.

Dalam upaya meredakan konflik di LCS, pemerintah Indonesia terutama menggunakan kekuatan lunak dan diplomasi. Namun, juga dipandang penting bagi Indonesia untuk meningkatkan sumber daya hard power-nya. Dalam menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat di LCS, pertahanan Indonesia dinilai masih jauh dari siap. Dibandingkan dengan kekuatan militer China, dengan mempertimbangkan jumlah personel dan aset angkatan laut sebagai indikator, kekuatan militer Indonesia jauh di belakang China. Kapal patroli Indonesia sering menghadapi intervensi militer dari China. Pemanfaatan kekuatan militer secara maksimal diyakini akan membawa dampak positif bagi Indonesia dalam menangani konflik Laut China Selatan

Sampai saat ini, Indonesia belum menyelesaikan semua kesepakatan delimitasi maritim dengan semua negara tetangga. Hal ini bisa dilihat pada data kesepakatan dengan negara-negara tetangga serta Australia seperti ditunjukkan tabel dibawah ini.

Tabel 1. Status Batas ZEE RI dengan negara tetangga di Asean & Australia

No	Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	Status	Informasi
1.	RI-Malaysia	Belum disepakati	Belum ada kesepakatan batas
2.	RI-Vietnam	Belum disepakati	Kesepakatan di tingkat teknis 3
3.	RI-Fillipina	Belum disepakati	Belum ada kesepakatan batas
4.	RI-Palau	Belum disepakati	Belum ada kesepakatan batas
5.	RI-PNG	Belum disepakati	Tidak ada batas laut
6.	RI-Timor Leste	Belum disepakati	Belum ada kesepakatan batas
7.	RI-India	Belum disepakati	Belum ada kesepakatan batas
8.	RI-Singapura	Belum disepakati	Belum ada kesepakatan batas
9.	RI-Thailand	Belum disepakati	Belum ada kesepakatan batas
10.	RI-Australia	Belum disepakati	ZEE di Samudera Hindia, LautArafura dan Laut Timor

Sumber: (Arto et al., 2021)

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan termasuk salah satunya dengan Vietnam. Baik Indonesia maupun Vietnam belum menyepakati tumpang tindih ZEE di sekitar Laut Natuna Utara yang kaya akan sumber daya kelautan. Mereka telah menandatangani perjanjian delimitasi Landas Kontinen pada tahun 2003. Namun, perjanjian tersebut tidak secara otomatis mencakup ZEE juga. Pengaturan delimitasi ZEE akan dibahas dan diatur lebih lanjut antar negara. Zona tumpang tindih yang diklaim kedua negara dapat dikelola bersama untuk kepentingan masing-masing negara untuk kepentingan ekonomi, kesejahteraan dan perlindungan lingkungan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Mekanisme sementara ini telah banyak digunakan di sejumlah negara perbatasan.

Dengan kenyataan munculnya berbagai

jenis ancaman tersebut, Indonesia perlu merespon dengan kemampuan dan kekuatan keamanan maritim yang memadai, sehingga berbagai ancaman tersebut dapat diminimalisir. Namun disadari bahwa pelaksanaan keamanan maritim tidaklah mudah, karena memerlukan pengaturan atau tata kelola yang sistematis, serta pengaturan atau pengelolaan yang baik. Penting bagi suatu negara untuk menggunakan soft power dan hard power dalam mengelola potensi sengketa perbatasan karena berkaitan erat dengan menjaga kedaulatan. Meskipun protes diplomatik adalah tindakan yang lebih disukai untuk menghindari konflik terbuka.

Pengembangan Strategi Ketahanan dan Pertahanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Dari pembahasan di atas dapat disampaikan bahwa walaupun terdapat kebijakan internasional serta kerangka hukum

di bidang keamanan maritim, khususnya yang berkaitan dengan delimitasi maritim, IUU Fishing dan perompakan, namun kebijakan dan undang-undang nasional masih bertentangan dengan undang-undang dan kebijakan internasional. Lebih lanjut dikatakan bahwa kondisi empiris yang ditunjukkan di atas membuat implementasi kebijakan menjadi sulit dan dengan demikian gagal mengambil tindakan yang diperlukan terhadap ancaman maritim. Namun, sebenarnya ada faktor pendukung dalam membangun keamanan maritim. Ini termasuk komitmen pemerintah dalam urusan kelautan. Presiden Indonesia Joko Widodo baru-baru ini mengumumkan konsep menyeluruh “Global Maritime Fulcrum” (GMF) sebagai pusat pemerintahannya.

Pada dasarnya merupakan visi nasional dan agenda pembangunan untuk membangun kembali budaya maritim negara menuju ekspansi ekonomi negara. Konsep tersebut juga menandakan doktrin strategis baru yang memproyeksikan Indonesia menjadi kekuatan maritim dengan pengaruh diplomatik yang cukup besar. Secara khusus, pemerintahan Jokowi berupaya memainkan peran sentral di dua wilayah maritim yang luas-samudera Hindia dan Pasifik. Diharapkan dengan konsep Presiden ini, langkah-langkah yang memadai dalam menghadapi ancaman dibutuhkan sinergitas antara militer dan

maritim akan diambil. Faktor pendukung lainnya adalah sumber daya manusia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk membentuk GMF sehingga dapat menjamin keamanan maritim di perairan Indonesia.

Visi GMF adalah program ambisius Indonesia untuk mengamankan wilayah kedaulatannya dari potensi ancaman. Dalam menghadapi potensi ancaman, instrumen penting yang harus diperhatikan adalah kemampuan diplomasi maritim dan peningkatan kemampuan dan sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Angkatan Laut. Berbagai potensi ancaman di wilayah laut Indonesia dapat diminimalisir. Baik ancaman keamanan tradisional maupun non-tradisional. Ancaman keamanan ini diidentifikasi dalam berbagai hal seperti pembajakan, terorisme, illegal logging dan imigran gelap merupakan jenis ancaman non-tradisional yang dominan. Meningkatnya jumlah kapal internasional yang melewati perairan Indonesia memungkinkan terjadinya kejahatan perompakan laut. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk kerentanan dari aspek keamanan, namun kerugian ekonominya sangat besar.

Tidak hanya itu, untuk meningkatkan eskalasi di ZEE Indonesia artinya semakin kementerian terkait kelautan untuk menjaga

kedaulatan dan keselamatan nelayan Indonesia yang beroperasi di lokasi tersebut. Membentuk pusat pengelolaan pertahanan dan keamanan negara yang merupakan wadah sinergitas antara sipil dan militer di bidang pertahanan negara yang bertugas memantau, menganalisis, dan merespons segala ancaman keamanan nasional yang terdapat di wilayah perairan khususnya ZEE Indonesia. Selanjutnya perlu adanya efisiensi dengan menggabungkan dan menyederhanakan kewenangan beberapa instansi sipil, untuk selanjutnya diserahkan kepada pusat pengelolaan pertahanan dan keamanan negara yang nantinya dapat menghilangkan kesan tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan Negara.

Secara internal, kebijakan pertahanan negara dibentuk melalui postur pertahanan negara dalam rangka menghadapi berbagai bentuk ancaman yang ada di zona ekonomi eksklusif. Indonesia telah membentuk kesatuan di Natuna dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara untuk menangani permasalahan di Laut Cina Selatan sehingga diperlukan postur pertahanan terhadap kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi konflik yang terjadi terus menerus di zona ekonomi eksklusif. Untuk diplomasi, diperlukan tahapan strategis perairan ZEE Indonesia. Dengan memperkuat

untuk menyeimbangkan pengaruh China dan Amerika Serikat. Sebagai contoh, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyiapkan dokumen diplomasi maritim, yang di dalamnya memuat beberapa poin elemen dimana Indonesia dapat mengatasi masalah, salah satunya adalah Laut Cina Selatan. Semoga ini dapat menjadi pedoman bersama bagi proses diplomasi maritim yang komprehensif yang saling terkait satu sama lain, sehingga ada pedoman bersama untuk mengatasi masalah LCS, dan kebijakan luar negeri dengan Amerika, Cina, dan masalah maritim lainnya.

4. SIMPULAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di lokasi yang sangat strategis, Indonesia harus menjamin keamanan atas perairannya. Pasalnya, perairan Indonesia merupakan salah satu jalur pelayaran internasional yang vital di dunia. Hal ini juga menimbulkan berbagai ancaman, tantangan serta hambatan yang harus diselesaikan guna memperluas pertahanan negara khususnya didaerah zona ekonomi eksklusif. Peran pertahanan dan ketahanan laut yang belum optimal dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara; ancaman kekuatan asing yang ingin memanfaatkan urusan dalam negeri, Indonesia dapat

menunjukkan jati dirinya sebagai negara kepulauan dengan budaya maritim yang baik dan wilayah maritim yang kuat, yang layak disebut sebagai poros maritim dunia. Pada saat yang sama, tumpuan maritim global juga sebenarnya menjadi alat bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan negara lain. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pilar-pilar yang ada, Indonesia perlu menjalin kerjasama yang baik untuk mendukung terwujudnya ambisi di poros maritim global serta untuk mempertahankan ketahanan ZEE Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alunaza SD, H., Sarifudin, M., & Rahayu, D. S. (2017). The Strategic Cooperation between Indonesia and Tiongkok under Jokowi' s Foreign Policy towards Global Maritime Diplomacy. *Strategic Cooperation*, 1–16.
- Arto, R. S., Pramono, B., Prakoso, L. Y., Suhirwan, & Sianturi, D. (2021). Indonesia Sea Defense Strategy in Overcoming Maritime Threats. *International Journal of Education and Social Science Research*, 04(03), 205–223. <https://doi.org/10.37500/ijessr.2021.4312>
- Aufiya, Mohd. A. (2017). Indonesia's Global Maritime Fulcrum: Contribution in the Indo-Pacific Region. *Andalas Journal of International Studies*, 6(2), 143–159.
- Lestari, Y., Lohalo, G. O., Diur, N. K., Mushinda, Aziz, M. F., Khamid, I., Anak, A. M. D. S., & Yogi, P. (2020). Possibility To Utilize Joint Arrangement On Fisheries Between Indonesia And Vietnam On Disputed Exclusive Economic Zone (EEZ) In The North Natuna Sea. In *Indonesian Law Journal* (Vol. 13, Issue 1).
- Budiana, M., Fedryansyah, M., Djuyandi, Y., & Pancasilawan, R. (2019). Indonesia military power under the increasing threat of conflict in the South China Sea. *Central European Journal of International and Security Studies*, 13(4), 259–274.
- D. Waluyo, Surryanto, & Risman, H. (2020). Indonesia Defense Diplomacy in Enhancing Indonesia-China Defense Cooperation. *Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 8(12), 586–593. <https://doi.org/10.36347/sjahss.2020.v08i12.004>
- Iis Gindarsah, A., & Priamarizki, A. (2015). Indonesia's Maritime Doctrine and Security Concerns. *RSIS Presents the Following Policy Report*, April, 1–15.
- Kristiyanto, dkk. (2021). Conflict and insurgency: national security threats in the Indonesian defense and security sector. *Ijmmu*, 8(10), 479–488.
- Laksmana, E. A. (2020). Indonesia and Anti-Access Warfare: Preliminary Policy Thoughts. *Indonesian Quarterly*, 48(4), 303–321.
- B. N., Mbumba, V. M., Kianga, S. M., &

- Minga, P. N. (2022). Security Cooperation between China and Indonesia to Address Maritime Security Threats. *Open Journal of Political Science*, 12(04), 534–555. <https://doi.org/10.4236/ojps.2022.124030>
- Narwastuty, D., And, A. T., & Sidabutar, N. (2020). The International Law of the Sea Border Dispute in Natuna Waters Concerning Sea Natural Resources in Water Border Based. *Indonesian Law Journal*, 13(1), 45–60.
- OECD. (2021). Sustainable Ocean Economy Country Diagnostics of Indonesia. In *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* (Issue April).
- Pikoli, A. N. P. (2021). Critical Analysis of Indonesia's Global Maritime Fulcrum under Joko Widodo: Problems and Challenges. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 10(1), 152. <https://doi.org/10.31314/pjia.10.1.152-108.2021>
- Pratiwi, F. I., Puspitasari, I., Hikmawati, I., & Bagus, H. (2021). Global Maritime Fulcrum: Indonesia's Middle Power Strategy Between Belt and Road Initiatives (BRI) and Free-Open Indo Pacific (FOIP). *Central European Journal of International and Security Studies*, 15(3), 30–54. <https://doi.org/10.51870/CEJISS.A150302>
- Putri, B. (2018). Indonesia's Role in The Indian Ocean Region Cooperation: Post-Iora Chairmanship Strategies. *OISAA Journal of Indonesia Emas*.
- Setiowati, R., Jati, S. P., Ali, M., & Widodo, P. (2022). Indonesia's Defence Strategy in Anticipating the Us-China Competition in the South China Sea. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 9009–9020.
- Sugiharto, A., & Shafwatullah, P. (2021). Maritime Diplomacy in Building Maritime National Security in Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia*, 9(2), 121–131.
- Sumarlan, S., & Dohamid, A. G. (2021). Indonesia defence diplomacy strategy in resolving china claims to Indonesia exclusive economic zone in north natuna sea. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(02). <https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.02.033>
- Tienh, A. L., Setiyono, B., Soemarmi, A., Trihastuti, N., & Setyawanta, L. T. (2021). Efforts in maintaining fisheries potential in the north natuna sea: Indonesian government policy against illegal, unregulated, and unreported fishing seen from the global maritime fulcrum perspective. *AAFL Bioflux*, 14(3), 1118–1125.
- Vimy, T., Wiranto, S., Rudiyanto, Widodo, P., & Suwarno, P. (2022). Indonesia's Strategy in Facing the Vuca Threat in South. *International Journal of Arts and Social*
- Wibawa, A. C., Supriyono, B., Muluk, M. K., & ...

(2020). Policy Evaluation on Maritime Security Issues in Indonesia. *Wacana*, 23(3), 165–173.

Zacharia RD, A., Ahmadani, F., & Danianto, P. (2021). National Resilience Strengthen Through the Reserve Component To

Resist Non-Military Threats. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 9(5), 351–359.
<https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i5.2021.3965>